

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan pelayanan publik dengan mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk program dan kegiatan dalam mengatasi kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten meningkat. Berdasarkan hasil pernyataan dari narasumber saat wawancara dan informasi dari berbagai sumber yang kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi *Nvivo*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten adalah pendapatan masyarakat yang masih rendah, jenis pekerjaan masyarakat mayoritas buruh tani, dan metode perhitungan tingkat kemiskinan yang digunakan berbeda. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten, yaitu dengan cara membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran dengan memberikan subsidi bantuan PKH, sembako, uang tunai, listrik dan iuran jaminan kesehatan BPJS.
2. Setiap dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dalam melakukan perencanaan anggaran melalui tahapan yang berbeda namun tujuannya sama. Setiap dinas sudah ditentukan pagu anggrannya untuk disusun

program kegiatan beserta anggaran yang dibutuhkan. Penyusunan anggaran diutamakan untuk program prioritas yang sesuai visi misi dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti anggaran yang terbatas maka perlu adanya penambahan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah selain itu juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan investor demi merealisasikan program dan kemajuan daerah Kabupaten Klaten.

3. Program pemerintah yang sudah diimplementasi sudah tepat sasaran dan masyarakat merasa puas dan terbantu dalam mengurangi beban pengeluarannya. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat. Sehingga perlu adanya *database* yang mencakup semua data masyarakat miskin dan adanya petugas khusus untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial tersebut. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi masyarakat yang lebih luas.
4. Pada penelitian ini peneliti menawarkan solusi agar program dapat diimplementasikan secara efektif digambarkan melalui model. Dalam model tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten harus melakukan pendataan masyarakat miskin yang valid yang dimasukan ke *database* yang terintegrasi agar semua instansi dan lembaga dapat mengakses data tersebut untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan, selain itu dalam melakukan perencanaan anggaran dan program

harus melibatkan masyarakat dan pihak independen agar anggaran transparan dan program kegiatan dapat dilaksanakan tepat sasaran dengan meminimalisir kendala yang ada.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini mengacu pada teori *stakeholder* yang mana semua upaya pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama dari berbagai pihak *stakeholder*. Berdasarkan teori *agency* pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam perencanaan anggaran harus fokus pada kepentingan masyarakat agar terhindar dari penyimpangan *self interest*, karena pemerintah daerah Kabupaten Klaten sebagai agen harus bertanggungjawab terhadap masyarakat. Pemerintah daerah juga harus mengacu pada peraturan-peraturan yang ada dan menerapkan instruksi pemerintah pusat untuk pemberantasan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem. Adanya instruksi dari pemerintah pusat tersebut diharapkan semua pihak yang terkait dapat bekerja sama dan menerapkan program yang sudah direncanakan untuk disalurkan ke masyarakat agar penghapusan kemiskinan tercapai

dengan begitu masyarakat bisa lebih sejahtera dan pelayanan publik menjadi lebih baik.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan pelayanan publik sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Model yang ditawarkan peneliti harapannya dapat dijadikan pertimbangan untuk diterapkan karena dalam proses perencanaannya melibatkan masyarakat dan pihak independen harapannya program kegiatan yang sudah direncanakan dapat diimplementasikan tepat sasaran dan merata kepada masyarakat luas.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti keterbatasan terkait informan. awalnya informan pada penelitian ini adalah kepala dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Pendidikan berjumlah 5 orang, Dinas Kesehatan berjumlah 5 orang dan Dinas Sosial berjumlah 5 orang sehingga total 15 orang. Karena kesibukan dari informan tersebut sehingga informan sulit untuk ditemui maka informan hanya satu atau dua orang yang mewakili dari masing-masing dinas yang berjumlah 7 orang. Keterbatasan lainnya adalah referensi dari penelitian sebelumnya sangat sedikit sehingga peneliti tidak memiliki pembandingan dan melihat gap penelitian secara lebih luas. Data

sekunder terkait data kemiskinan dari pemerintah daerah lain ditambahkan pada penelitian ini sebagai acuan dan bahan literasi lainnya. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mencari informasi diberbagai daerah dan bidang/dinas lainnya untuk melihat perspektif lain dari faktor penyebab kemiskinan dan hal-hal yang perlu diperbaiki agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera.

